



# Bukti APBD Dikelola Transparan



IST/PROKOPIM

**PENYERAHAN** - Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) Wahyu Priyono menyerahkan piagam WTP secara langsung kepada Bupati Kayong Utara Citra Duani dan turut dihadiri Ketua DPRD Kayong Utara Sarnawi, Inspektur Kayong Utara Oma Zulhithansyah dan Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kayong Utara Tengku Rosihan Anwar, Pontianak, Selasa (16/5/23).

**KAYONG, TRIBUN** - Sebuah prestasi gemilang kembali dicatat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dengan berhasil meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedua kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kayong Utara tahun Anggaran 2022. Penyerahan piagam WTP dilakukan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) Wahyu Priyo-

no kepada Bupati Kayong Utara Citra Duani dan turut dihadiri Ketua DPRD Kayong Utara Sarnawi, Inspektur Kayong Utara Oma Zulhithansyah dan Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kayong Utara Tengku Rosihan Anwar, Pontianak, Selasa (16/5/23).  
"Ini menjadi bukti bahwa APBD Tahun Anggaran 2022 telah dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas," ungkap Bupati Citra.  
"Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bisa menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun

2022 dengan memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan, dimana membenahi dengan menidakanjuti rekomendasi yang diajukan BPK dari tahun-tahun sebelumnya, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang andal berdasarkan dengan SAP berbasis akrual," tambah Bupati Citra dalam rilis kepada Tribun, kemarin.  
Untuk itu, Bupati Citra berpesan kepada seluruh jajaran agar bisa mempertahankan predikat WTP dengan menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang andal berdasarkan aturan

yang telah ditetapkan dimana penyajian LKPD sesuai kaidah akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  
Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara, Tengku Rosihan Anwar mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara akan memperhatikan permasalahan yang direkomendasikan BPK dan menidakanjutinnya agar tidak menjadi hambatan kedepannya dalam pengelolaan keuangan.  
"Langkah ke depan dalam

mempertahankannya dengan melibatkan OPD agar dapat meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan dan penyajian laporan keuangan pada OPD yang dikompilasi menjadi LKPD Pemerintah daerah yang terpercaya dan andal," tutup Rosihan. (rhd)